



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PDI Perjuangan Mengkritik Pengelolaan Pulau Reklamasi Kebijakan Anies dianggap tak dibuat berdasarkan aturan.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Kebijakan Gubernur Anies Rasyid Baswedan ihwal pengelolaan tiga pulau reklamasi yang diserahkan kepada perusahaan daerah, PT Jakarta Propertindo, menuai kritik. Anies dianggap cuci tangan dengan melegalkan reklamasi yang telanjur dilakukan oleh para pengembang di pesisir Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Gembong Warsono, menyinggung kebijakan Anies sebelumnya yang anti-reklamasi dengan menghentikannya. Tapi kini Anies melegalkan reklamasi Pulau C, D, dan G di bawah PT Jakpro. Dia juga mengganti nama pulau-pulau buatan tersebut dengan Kawasan Pantai Kita, Maju, dan Bersama.

"Saya katakan, Pak Anies menggunakan tangannya Jakpro untuk melegalkan reklamasi," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Politikus partai pemilik suara terbesar di DPRD itu juga mempertanyakan kewajiban pengembang membayar kontribusi 15 persen kepada DKI, padahal hak pengelolaannya telah dicabut. "Ini menunjukkan ke publik Jakarta bahwa dia menolak reklamasi, tapi bentuk penolakannya seperti apa, tidak jelas."

Gubernur Anies membatalkan izin reklamasi di 13 pulau dari rencana 17 pulau yang akan dibangun. Tapi reklamasi tetap dilanjutkan di pulau-pulau yang sudah dibangun, yakni Kita dan Maju milik PT Kapuk Naga Indah, serta Pulau Bersama yang ditangani PT Muara Wisesa Samudra. Lewat Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan Tanah Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Gubernur Anies menugasi PT Jakpro untuk mengelolanya.

Pengambilalihan pengelolaan tak membuat kedua perusahaan pengembang ditendang. Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan perusahaan bakal bekerja sama dengan PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudra dalam pengelolaan. Dwi belum membeberkan secara detail bentuk kerja sama itu.

Tempo melihat proyek pembangunan di pulau reklamasi masih terus berjalan, kemarin. Truk-truk pengangkut pasir masih hilir-mudik dari sudut pulau ke arah tengah Pulau Maju. Puluhan pekerja juga terlihat sibuk membangun hunian dan gedung bertingkat di dalam Pulau Kita. Tak ada plang nama proyek PT Jakpro di sana. "Ini tidak libur sampai

akhir tahun," kata seorang pekerja kepada *Tempo*.

"Nanti kami bisa kerja sama dengan pengembangnya. Kerja sama dengan, taruh lah, orang-orang yang mau memanfaatkan area ini nanti," ucap Dwi, dua hari lalu.

Menanggapi kritik Gembong terhadap Anies, Corporate Secretary PT Jakpro, Hani Sumarno, menyatakan pembangunan fasilitas di pulau reklamasi perlu disegerakan. "DPRD memang tugasnya mengkritik pemerintah," tutur dia kepada *Tempo*, kemarin.

Gembong pun mempersoalkan dasar hukum penyerahan pengelolaan pulau reklamasi kepada PT Jakpro. Menurut dia, seharusnya pengelolaan dilakukan oleh pemerintah DKI. Sebab, PT Jakpro adalah perusahaan yang setara dengan pengembang pulau reklamasi. Itu sebabnya posisi PT Jakpro tak kuat dalam pengelolaan pulau.

Dia menyebutkan Anies tak bisa begitu saja mengizinkan PT Jakpro membangun infrastruktur dan gedung di pulau reklamasi sebelum ada peraturan daerah tentang reklamasi. Gembong khawatir pembangunan tersebut tidak sesuai dengan rancangan aturan yang sedang digodok di Balai Kota.

Pemerintah DKI masih

menyusun aturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Draf tersebut juga mengatur tentang tata ruang darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan panduan pembangunan di pulau reklamasi. Rencananya, rancangan dibahas lagi pada Januari nanti.

Di sisi lain, Anies meresmikan pembangunan jalan yang akan mengitari Pulau Kita dan Pulau Maju pada 23 Desember lalu. "Tidak menyalahi aturan, dan kami nanti siapkan aturannya," kata dia, Jumat pekan lalu.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah, yang juga Ketua Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, mengatakan proyek jalur jalan sehat dan sepeda santai itu dilandasi kerja sama PT Kapuk Naga Indah dengan DKI, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah yang diteken Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

"Itu ada PKS-PKS (perjanjian kerja sama) terdahulu dari gubernur-gubernur terdahulu, itu sudah ada," ujar Saefullah di kawasan Monumen Nasional, kemarin.

● AVIT HIDAYAT | LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PDI Perjuangan Mengkritik Pengelolaan Pulau Reklamasi

Penugasan yang Memunculkan Tanya

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantura Jakarta. Penugasan tersebut menuai kritik, mengingat status hukum PT Jakarta Propertindo setara dengan dua perusahaan pengembang pulau reklamasi, PT Kapuk Naga Indah serta PT Muara Wisesa Samudra.

Berikut ini sejumlah kewenangan PT Jakarta Propertindo berdasarkan Pergub Nomor 120 Tahun 2018:

- PT Jakpro berwenang mengelola lahan kontribusi hasil reklamasi, mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum tanah hasil reklamasi yang telah dibangun dan diserahkan oleh pengembang ke pemerintah DKI. Pengelolaan dilakukan di Pulau C, D, dan G (yang sudah diubah menjadi Kawasan Pantai Kita, Maju, dan Bersama).
- PT Jakpro mengelola lahan kontribusi sesuai dengan panduan rancang kota dan kerja sama.
- Pengelolaan lahan kontribusi diutamakan untuk kepentingan masyarakat pesisir yang terkena dampak, di antaranya untuk membangun rumah susun untuk MBR, pasar tematik ikan, restoran ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, dermaga, dan prasarana umum lainnya.
- PT Jakpro berwenang mengelola air bersih, persampahan, air limbah, drainase, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, transportasi, dan bidang lainnya.
- Pendanaan untuk pengelolaan tanah hasil reklamasi berasal dari modal perusahaan, patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah, penyertaan modal pemerintah daerah, hibah yang sah dan tidak mengikat, pinjaman, atau bentuk pendanaan lain yang sah.
- PT Jakpro dapat bekerja sama dengan pengembang, yakni PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudra.

● AVIT HIDAYAT | JDIH.JAKARTA